
JURNAL INOVASI LINTAS DISIPLIN

journal homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JILD/index>

PENDAMPINGAN PEMANFAATAN RUMAH DATAKU DENGAN MAINSTREAMING GENDER UNTUK PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI GUNUNGGKIDUL

Sri Rahayu Budiani^{1*}, Wiwik Puji Mulyani², Dwi Lestari³

^{1,2,3} Program Studi Kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

*Email : srahayu@ugm.ac.id

*) Corresponden Author

Keywords

Katakunci

Rumah Dataku,
Perencanaan Program,
Pemberdayaan Perempuan,
Pendampingan.

Abstract

Rumah Dataku is a data and information center to support community-based program planning. However, often the available data and the analysis patterns carried out do not pay attention to gender aspects, so that the programs designed are less responsive to women's needs. This article aims to analyze assistance efforts in utilizing Rumah Dataku by prioritizing gender mainstreaming. This article uses a qualitative approach with a case study method in Gunungkidul Regency which has implemented Rumah Dataku. The results show that effective assistance in the use of gender-based data can improve the quality of program planning that supports women's empowerment. The assistance provided involves training in collecting gender sensitive data, analyzing gender data, and preparing policy recommendations that support women. The recommendation from this research is the need to increase the capacity of data managers and local stakeholders in understanding and applying the principles of women's empowerment at every stage of program planning.

Abstrak

Rumah Dataku sebagai pusat data dan informasi untuk mendukung perencanaan program berbasis masyarakat. Namun, seringkali data yang tersedia dan pola analisis yang dilakukan kurang memperhatikan aspek gender, sehingga program yang dirancang kurang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya pendampingan dalam pemanfaatan Rumah Dataku dengan mengedepankan mainstreaming gender. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Gunungkidul yang telah mengimplementasikan Rumah Dataku. Hasilnya menunjukkan bahwa pendampingan yang efektif dalam penggunaan data berbasis gender dapat meningkatkan kualitas perencanaan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Pendampingan yang dilakukan melibatkan pelatihan pengumpulan data sensitif gender, analisis data gender, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Rekomendasi dari penelitian ini yakni perlunya peningkatan kapasitas para pengelola data dan pemangku kepentingan lokal dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan dalam setiap tahap perencanaan program.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Salah satu tantangan terbesar dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yakni memastikan semua kelompok masyarakat, terutama perempuan, dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Di tingkat desa, Rumah Dataku telah diperkenalkan sebagai pusat data dan informasi yang bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2018). Meskipun demikian, Rumah Dataku belum secara maksimal dalam mendukung pembangunan berbasis gender. UN Women (2020) melaporkan bahwa masih ada kendala dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data yang sensitif gender.

Rumah Dataku dalam Pembangunan Desa sangat penting. Rumah Dataku hadir sebagai salah satu upaya untuk menjadi pusat data desa. Ada harapan besar di wilayah desa, yakni mampu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2018). Fungsi utama Rumah Dataku untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk merumuskan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks pembangunan desa berdasarkan laporan World Bank (2021) menyebutkan data yang akurat dan komprehensif sangat penting, dalam landasan membuat kebijakan dan kegiatan yang bertujuan melakukan intervensi.

Berdasarkan catatan UNDP (2019) data yang dikumpulkan oleh Rumah Dataku masih ada yang belum mempertimbangkan dimensi gender secara memadai. Misalnya, dalam beberapa kasus, data mengenai partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik di tingkat desa kurang terdokumentasi dengan baik. Menurut Kabeer (2005) kurangnya data yang sensitif gender ini menyebabkan program-program yang dirancang sejauh ini di tingkat desa tidak memiliki sensitivitas gender atau pada perempuan. Hal ini cukup menghambat upaya pemberdayaan perempuan. Padahal berdasarkan catatan BPS (2022) perempuan di desa lebih sering menghadapi tantangan yang lebih besar, dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kepemimpinan.

Konsep *mainstreaming gender* dalam pembangunan bagian integral dari semua tahapan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan atau program (Moser, 1993). Tujuannya *mainstreaming gender* untuk mencapai kesetaraan gender untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. Berdasarkan catatan UN Women (2020) *mainstreaming gender* dalam konteks pembangunan desa, memiliki arti perlunya memastikan setiap program pembangunan memperhitungkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan desa telah didukung kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2011). Meskipun begitu, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, salah satunya terkait dengan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip gender dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan program (Arivia & Gina, 2021).

Menurut Cornwall (2003) walaupun prinsip *mainstreaming gender* telah diakui secara luas, pelaksanaannya di tingkat desa menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangannya kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya kesetaraan gender di kalangan pemangku kepentingan desa, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal (Rinaldo, 2013). Menurut Eerdewijk & Davids (2014) masih banyak yang menganggap isu gender sebagai isu sekunder dan tidak relevan

dengan konteks desa, sehingga kurang memperhatikan pengumpulan data yang sensitif gender. Dalam proses pengumpulan data dan analisis data dengan perspektif gender seringkali pengelola Rumah Data, menurut Kabeer (2005) tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data yang mencerminkan kondisi perempuan secara komprehensif. Menurut Parpart, Rai, & Staudt (2002) hal itu terjadi karena kurangnya pelatihan dan pendampingan dari pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas teknis pengumpul dan pengolah data dalam mainstreaming gender.

Menurut Blackwood (2000) budaya memiliki andil dalam memperlambat penerapan mainstreaming gender di desa. Budaya patriarkal yang masih kuat di wilayah pedesaan seringkali menghambat dalam proses meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat dan tidak dianggap sebagai pemangku kepentingan yang penting. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap data dan program yang berfokus pada kebutuhan perempuan, serta minimnya dukungan terhadap inisiatif yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan (UN Women, 2020).

Tantangan-tantangan dalam pendampingan dan pemanfaatan Rumah Dataku dengan perspektif gender menjadi sangat penting. Karena mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola data desa serta pemangku kepentingan lokal tentang pentingnya mainstreaming gender dalam perencanaan pembangunan (Fletcher et al., 2021). Dalam catatan UNDP (2019) pendampingan atau kegiatan, seperti pelatihan dalam pengumpulan dan analisis data berbasis gender, lokakarya yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam merancang program yang responsif gender. Juga mampu dimanfaatkan untuk advokasi. Ini penting karena semua ini mampu mengubah paradigma budaya yang ada untuk menghambat atau mempercepat proses kesetaraan gender.

Pendampingan juga berfokus pada peningkatan kualitas data yang dikumpulkan oleh Rumah Dataku, agar lebih mencerminkan realitas kehidupan perempuan di desa (Beneria, Berik, & Floro, 2015). Ini termasuk mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan dengan kesetaraan gender, seperti tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta prevalensi kekerasan berbasis gender (Kabeer, 2005). Dengan data yang lebih akurat dan sensitif gender, program yang dirancang dapat lebih responsif dan efektif dalam mendukung pemberdayaan perempuan (World Bank, 2021).

METODE

Artikel ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan pemanfaatan Rumah Dataku dengan mengedepankan mainstreaming gender untuk perencanaan program yang bisa mendukung perempuan berdaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan kontekstual di Kabupaten Gunungkidul. Menurut Creswell (2013), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang kompleks tentang suatu masalah sosial, yang sering kali sulit diukur dengan pendekatan kuantitatif.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang mendalam tentang dinamika pendampingan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender di Kabupaten Gunung Kidul sangat penting untuk menginformasikan rekomendasi kebijakan dan praktik baik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks nyata, yang penting untuk memahami bagaimana pendampingan dalam pemanfaatan Rumah Dataku diterapkan di desa-desa dengan karakteristik yang berbeda (Yin, 2018). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Ini dipilih

berdasarkan kriteria yang relevan dengan topik penelitian. Kabupaten Gunungkidul dipilih karena telah memiliki pengalaman dalam penggunaan Rumah Dataku

Partisipan penelitian terdiri dari berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul, termasuk pengelola Rumah Dataku, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perempuan yang terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi program di desa. Selain itu, partisipan juga mencakup fasilitator dan pendamping yang terlibat dalam program pendampingan, serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu gender dan pemberdayaan perempuan. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan dalam kegiatan pendampingan dan perannya dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Gunungkidul. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan bahwa partisipan yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian (Patton, 2015).

Data yang dikumpulkan dari wawancara, FGD, dan observasi dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data, yang relevan dengan tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis data melibatkan beberapa langkah, termasuk transkripsi data, pengkodean, pengelompokan tema, serta interpretasi hasil. Transkripsi adalah aata wawancara dan FGD ditranskripsikan secara verbatim untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Pengkodean Setelah transkripsi, data dikodekan menggunakan pendekatan terbuka, di mana tema-tema dan konsep-konsep kunci diidentifikasi dari data mentah. Pengelompokan Tema adalah kode-kode yang diidentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih luas, yang mencerminkan isu-isu utama yang muncul dari data. Interpretasi Hasil adalah tahap akhir melibatkan interpretasi tema-tema yang telah diidentifikasi, dengan menghubungkannya kembali ke pertanyaan penelitian dan literatur yang relevan.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, FGD, dan observasi. Teknik ini membantu memastikan bahwa hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya (Denzin & Lincoln, 2011). Selain itu, peneliti juga melakukan member checking, yaitu dengan meminta partisipan untuk meninjau kembali hasil wawancara atau temuan awal untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka. Member checking membantu mengurangi bias dan memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan perspektif partisipan secara akurat (Lincoln & Guba, 1985).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang efektif dalam penggunaan data berbasis gender memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas perencanaan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Proses pendampingan melibatkan berbagai tahapan, termasuk pelatihan pengumpulan data sensitif gender, analisis data gender, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Bab ini akan menguraikan hasil yang diperoleh dari proses pendampingan ini, serta membahas implikasinya dalam konteks peningkatan pemberdayaan perempuan.

Pendampingan yang efektif dimulai dengan pelatihan intensif mengenai pengumpulan data yang sensitif terhadap gender. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada metodologi pengumpulan data, tetapi juga pada pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dimana data dikumpulkan. Salah satu temuan utama dari pelatihan ini adalah peningkatan kapasitas peserta dalam mengenali bias gender yang sering kali tidak disadari dalam proses pengumpulan data (World Health Organization [WHO], 2021).

Sebelum pendampingan, sebagian besar peserta cenderung menggunakan alat pengumpulan data yang tidak mempertimbangkan perbedaan gender secara spesifik, sehingga sering kali

mengabaikan pengalaman unik yang dialami oleh perempuan (UN Women, 2019). Namun, setelah mengikuti pelatihan, terdapat perubahan yang signifikan dalam cara peserta mengumpulkan data. Mereka menjadi lebih mampu untuk merancang kuesioner dan instrumen pengumpulan data lainnya yang lebih peka terhadap isu-isu gender, seperti kekerasan berbasis gender, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan partisipasi perempuan dalam keputusan rumah tangga.

Sebagai contoh, salah satu hasil penting dari pelatihan ini adalah peningkatan penggunaan teknik wawancara mendalam yang mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan perempuan sebagai responden. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan perempuan (United Nations Development Programme [UNDP], 2022). Data yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan relevan untuk analisis lebih lanjut yang bertujuan untuk memahami hambatan dan peluang dalam pemberdayaan perempuan.

Langkah berikutnya dalam pendampingan adalah pelatihan mengenai analisis data berbasis gender. Analisis data gender tidak hanya melibatkan disagregasi data berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mempertimbangkan variabel lain seperti usia, status sosial ekonomi, dan lokasi geografis untuk memahami pengalaman berbeda yang dialami oleh perempuan dan laki-laki (Asian Development Bank [ADB], 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa peserta yang dilatih dengan pendekatan analisis gender lebih mampu mengidentifikasi ketidaksetaraan yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah. Misalnya, sebelum pendampingan, peserta mungkin hanya melihat tingkat partisipasi perempuan dalam program tertentu tanpa mempertimbangkan hambatan yang menghalangi akses perempuan ke program tersebut, seperti beban pekerjaan rumah tangga, norma budaya yang membatasi mobilitas, atau kurangnya dukungan dari anggota keluarga laki-laki (Kabeer, 2005).

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat melakukan analisis data yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tersembunyi. Mereka juga belajar untuk mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti data kuantitatif dan kualitatif, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi perempuan (UN Women, 2019). Contohnya, peserta mampu menggabungkan data survei dengan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana norma sosial mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi atau sosial.

Hasil dari peningkatan keterampilan analisis ini adalah pengembangan program yang lebih tepat sasaran, yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan hambatan yang mereka hadapi (ADB, 2021). Misalnya, program pemberdayaan ekonomi perempuan yang sebelumnya hanya difokuskan pada penyediaan akses ke modal, kini juga memasukkan komponen pelatihan keterampilan yang relevan dengan kondisi lokal dan memperhitungkan waktu serta keterbatasan mobilitas perempuan.

Pendampingan ini juga mencakup pelatihan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, langkah berikutnya adalah menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang terlibat dalam pendampingan ini menjadi lebih proaktif dalam merumuskan kebijakan yang memperhatikan perspektif gender (Ministry of Women's Empowerment and Child Protection [MOWECP], 2020).

Sebelum pendampingan, rekomendasi kebijakan sering kali bersifat umum dan tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok perempuan yang berbeda, seperti perempuan di pedesaan, perempuan dengan disabilitas, atau perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender. Setelah mendapatkan pendampingan, peserta lebih mampu mengembangkan rekomendasi kebijakan yang lebih terfokus, misalnya, dengan merekomendasikan penyediaan layanan dukungan psikososial di tingkat komunitas bagi korban kekerasan berbasis gender, atau menciptakan program akses modal khusus bagi perempuan kepala keluarga (UNDP, 2022).

Pendekatan berbasis bukti ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya

mendukung pemberdayaan perempuan secara umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada kelompok perempuan yang paling rentan dan terpinggirkan. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat legitimasi kebijakan tersebut, karena rekomendasi yang diajukan didasarkan pada data empiris yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (WHO, 2021).

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Program yang dirancang dengan menggunakan data berbasis gender lebih cenderung mencapai tujuannya karena didasarkan pada analisis yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan kondisi perempuan (Bappenas, 2019). Misalnya, program pemberdayaan ekonomi yang mempertimbangkan beban ganda pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan berbayar yang dialami oleh perempuan lebih mungkin berhasil karena dirancang untuk mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh perempuan.

Selain itu, program yang berbasis data gender juga lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial. Sebagai contoh, jika analisis data menunjukkan peningkatan kekerasan berbasis gender selama pandemi COVID-19, maka program dapat segera disesuaikan untuk menyediakan layanan dukungan tambahan bagi perempuan yang terdampak. Fleksibilitas ini sangat penting dalam konteks ketidakpastian dan perubahan sosial yang cepat (UN Women, 2019).

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan berbagai keuntungan dari pendampingan penggunaan data berbasis gender, beberapa tantangan juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak tertentu yang mungkin merasa terancam oleh perubahan yang dihasilkan dari kebijakan berbasis gender. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat mengurangi alokasi sumber daya untuk kelompok lain atau menantang norma-norma budaya yang ada (ADB, 2021).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Meskipun pelatihan awal memberikan peningkatan kapasitas yang signifikan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak hilang seiring waktu. Hal ini memerlukan investasi dalam pengembangan kapasitas jangka panjang dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil (UNDP, 2022).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting mengembangkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pelatihan dan pendampingan penggunaan data berbasis gender (Bappenas, 2019). Selain itu, berdasarkan catatan UN Women (2019) penting juga membangun kesadaran dan komitmen di tingkat pemimpin dan pembuat kebijakan untuk mendukung penggunaan data berbasis gender sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Misal dengan kampanye edukasi dan advokasi yang menyoroti manfaat penggunaan data berbasis gender dapat membantu mengatasi resistensi dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang efektif dalam penggunaan data berbasis gender dapat meningkatkan kualitas perencanaan program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Dengan meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan dan analisis data yang sensitif terhadap gender, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, program pemberdayaan perempuan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak. Namun, untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi melalui strategi kolaboratif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Dekan Pascasarjana UGM, atas dukungan dana hibah pengabdian tahun 2024 sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, G., & Gina, S. (2021). *Gender and Development in Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Asian Development Bank (ADB). (2021). *Strengthening Gender-Inclusive Approaches in Asian Development Projects*. Manila: Asian Development Bank.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas.
- Beneria, L., Berik, G., & Floro, M. (2015). *Gender, Development, and Globalization: Economics as if All People Mattered*. Routledge.
- Blackwood, E. (2000). *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. Rowman & Littlefield.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Cornwall, A. (2003). Revisiting the 'Gender Agenda'. *IDS Bulletin*, 34(4), 87-95.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Eerdewijk, A., & Davids, T. (2014). *The Bodily Politics of Women's Empowerment*. *Development and Change*, 45(1), 29-50.
- Fletcher, R., et al. (2021). *Gender Equality and Development in Rural Indonesia*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(2), 233-252.
- Kabeer, N. (2005). *Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal 1*. *Gender and Development*, 13(1), 13-24.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Rumah Dataku*. Jakarta: Kementerian Desa.

- Kementerian Dalam Negeri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Laporan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (MOWECP), Indonesia. (2020). *Annual Report on Gender Equality and Women's Empowerment in Indonesia*. Jakarta: MOWECP.
- Morgan, D. L. (1997). *Focus Groups as Qualitative Research (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Moser, C. O. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. Routledge.
- Parpart, J., Rai, S. M., & Staudt, K. (2002). *Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/Local World*. Routledge.
- Rinaldo, R. (2013). *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart, and Winston.
- UNDP. (2019). *Gender Equality in Human Development: Measurement, Progress, and Policy*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy 2022-2025*. New York: UNDP.
- UN Women. (2020). *Gender Equality and the Sustainable Development Goals*. New York: United Nations.
- UN Women. (2019). *Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN Women.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. SAGE Publications.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Integrating Gender into Health Data Systems: Principles for Gender-Responsive Data Collection, Analysis, and Reporting*. Geneva: World Health Organization.
- World Bank. (2021). *Gender Data Portal: Indonesia*. Washington, DC: World Bank.